

OPINI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERANAN POLISI SEBAGAI PELINDUNG, PENGAYOM DAN PELAYAN MASYARAKAT DI DAERAH RAWAN KONFLIK KOTA MAKASSAR

Adi Jaya Buluara, Hafied Cangara, Jeany Maria Fatimah

Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Abstract

Public figures are representative of the community itself because he was acting on behalf of the public or opinion leaders in his name so that people become essential for the police in carrying out its role as protector and waiter society. The aim of the research was to determine the opinion of public figures on the roles of police as protectors, paragons, and servants of community in the conflict prone areas of Makassar City. The research was conducted in Makassar District and Tamalate District. The data were presented qualitatively in narrative forms. The methods of obtaining the data were observation and interview and other relevant data. The results of the research indicate that the opinion of public figures on the roles of police as protectors, paragons, and servants of community are manifested when they are overcoming and guarding against conflicts. The protection perceived by community is their actions to drive the community who are conflicting and guard on-site brawl, while the form of service perceived by the community is quick response from the police based on the report from the community. The opinion from public figures is the main reference to fulfill the need of police force especially related to the fulfillment of facilities supporting police's tasks in the field. It is also initial information in investigating the root of conflict among groups in the society which has implications on the actions of professional and accountable police force.

Keywords: Opinion; Community Leaders; Police; Conflict

Abstrak

Tokoh Masyarakat merupakan representatif dari masyarakat sendiri karena dia bertindak mewakili masyarakat atau mengatasnamakannya sehingga opini tokoh masyarakat menjadi hal yang esensi bagi kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui opini tokoh masyarakat terhadap peranan polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di daerah rawan konflik Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Makassar dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini tokoh masyarakat terhadap peranan polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat diwujudkan dalam kehadirannya pada saat mengatasi ataupun mencegah terjadinya konflik. Bentuk perlindungan yang dirasakan masyarakat adalah tindakan polisi menghalau warga yang bertikai dan melakukan penjagaan di lokasi tawuran. Bentuk pengayoman diaplikasikan dengan memberikan pembinaan kepada warga, baik orang tua maupun anak muda di wilayah rawan konflik. Adapun bentuk pelayanan dapat dirasakan dengan respon yang cepat polisi terhadap laporan masyarakat. Opini tokoh masyarakat menjadi referensi utama dalam pemenuhan kebutuhan lembaga kepolisian, khususnya terkait pemenuhan akan fasilitas yang menunjang tugas kepolisian di lapangan. Selain itu, merupakan informasi awal dalam menemukan akar masalah konflik antarkelompok di masyarakat, yang tentunya berimplikasi terhadap tindakan kepolisian yang profesional dan akuntabel.

Kata kunci: Opini; Tokoh Masyarakat; Polisi; Konflik

PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia dan menempatkannya pada urutan ke-5 (lima). Peningkatan jumlah penduduk berakibat pada semakin sempitnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang ikut memicu pengangguran dan kepadatan penduduk, Heimstra dan McFarling dalam Hasnida (2002), Menyatakan bahwa kepadatan penduduk memiliki dampak sosial antara lain meningkatnya kriminalitas dan kenakalan remaja. Perilaku tersebut sangat rentan dalam melahirkan konflik di masyarakat yang dapat berujung pada terjadinya Tawuran warga.

Polisi memiliki peran sentral untuk membantu menyelesaikan konflik dan permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat termasuk di dalamnya penanganan konflik antar kelompok atau tawuran warga, data Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa di tahun 2014 ada dua kecamatan di kota Makassar yang paling tinggi angka tawuran warga yaitu kecamatan Makassar sebanyak 19 (sembilan belas) kali, di susul kecamatan Tamalate sebanyak 14 (empat belas) kali.

Polrestabes Makassar merupakan lembaga kepolisian pada tingkat kota dalam jajaran wilayah Sulawesi Selatan, yang memiliki cakupan wilayah hukum di 12 (dua belas) kecamatan kota Makassar. selalu berusaha untuk menjadi lembaga yang dicintai oleh masyarakatnya dijabarkan dalam peranannya sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan sehingga terjalin sinergitas yang berkesinambungan antara masyarakat dan aparat keamanan.

Wicaksono (2011), melihat bahwa fungsi utama polisi disamping sebagai mediator, negosiator, *peace keeping officer* yang profesional dan proporsional, adalah kemampuan Polri untuk membantu menyelesaikan konflik secara cepat,

komprehensif, dan tuntas sesuai akar masalahnya sehingga tidak berlarut-larut berkembang ke tahapan yang lebih tinggi dan memunculkan konflik susulan.

Dalam masyarakat sendiri kita masih menemukan Seseorang yang ditokohkan karena memiliki sifat keteladanan atau kita kenal dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat merupakan representatif dari masyarakat itu sendiri karena dia bertindak mewakili masyarakat atau mengatasnamakannya, (Tanto dalam Suhendi, 2013). baik mereka sebagai elit formal maupun elit informal dimana mereka memiliki kedudukan sosial dan dihormati di lingkungannya.

Wulansari (2014), menyatakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat tentu ada sekelompok orang yang memiliki kedudukan yang berpengaruh dan diakui sebagai pemimpin oleh suatu kelompok atau golongan tertentu dalam mengontrol perilaku masyarakatnya yang disebut dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat memiliki tugas dan fungsi yaitu mampu merencanakan, mengorganisir, serta mengontrol warganya.

Soemirat (2003), mengatakan bahwa Suatu issue itu timbul kalau terdapat konflik, kegelisahan atau frustrasi. Masalah konflik yang terjadi di masyarakat melahirkan dua bentuk masyarakat yaitu masyarakat yang peduli terhadap permasalahan tersebut lalu membuat pendapat atau Opini, sementara masyarakat yang tidak peduli lalu diam.

Menjaring opini merupakan hal yang esensi dalam organisasi kepolisian sebagai bahan evaluasi untuk memproyeksikan kendala-kendala di masa mendatang. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui opini tokoh masyarakat mengenai peranan polisi sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan khususnya di daerah rawan konflik Kota Makassar.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka ada tiga permasalahan pokok yang dirumuskan:

1. Bagaimana opini para tokoh masyarakat terhadap peranan Polisi sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat pada daerah rawan konflik antar kelompok di kota Makassar?
2. Bagaimana bentuk perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan yang telah diberikan oleh polisi kepada masyarakat terutama pada daerah rawan konflik antar kelompok di Kota Makassar?
3. Bagaimana pentingnya opini tokoh masyarakat sebagai modal sosial dalam pengambilan kebijakan bagi para elit kepolisian dalam melaksanakan peranan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat daerah rawan konflik kota makassar?

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di dua kecamatan rawan konflik kota Makassar, yakni:

1. Kecamatan Tamalate
2. Kecamatan Makassar.

Kedua lokasi tersebut mendominasi terjadinya konflik antar kelompok kota Makassar di tahun 2013 dan 2014. di daerah tersebut juga ada beberapa tokoh masyarakat yang selalu menjadi pemuka pendapat warga sekitar sehingga dari merekalah akan diketahui seberapa pentingnya peranan polisi sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan di wilayah mereka.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Camat, Lurah, Babinkamtibmas, ketua RW/RT, Tokoh Agama, dan Orang yang di tuakan. Jenis dan Sumber Data, yakni Data Primer

dan Data Sekunder. Penelitian ini secara umum adalah untuk mengevaluasi bagaimana Opini tokoh masyarakat khususnya daerah rawan konflik di kota Makassar mengenai peranan polisi sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat. Teknik Pengumpulan Data, digunakan teknik wawancara dan observasi.

HASIL

Penyebab terjadinya konflik

Hampir sebagian besar informan berpendapat bahwa Konflik Tawuran warga yang terjadi di kota makassar kebanyakan diawali oleh konflik antar individu dan semakin meluas ketika konflik itu di bawa ke kelompok, Ketua RW 1 kelurahan Pa'baeng-Baeng juga menyatakan bahwa tawuran di wilayahnya sering dikarenakan minuman keras dan obat-obatan.

Lurah bara-baraya sendiri melihat bahwa kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi dikarenakan sulitnya mendapat pekerjaan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan konflik di masyarakat, Babinkamtibmas kecamatan makassar sendiri selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat melihat bahwa Ketidakhahaman masyarakat mengenai aturan dan upaya-upaya dalam menyelesaikan konflik kesemuanya dapat memberikan efek terhadap perilaku individu. Apabila perilaku tersebut merugikan orang lain maka besar kemungkinan konflik dapat terjadi.

Seperti yang dikemukakan oleh Orang yang di tuakan di kelurahan pa'baeng-baeng bahwa tawuran yang terjadi di wilayahnya bermula ketika warga dari luar masuk ke wilayahnya dan melakukan penyerangan sehingga warganya membalas serangan tersebut sebagai bentuk pertahanan dari ancaman pihak luar.

Tindakan Polisi dalam mengatasi dan mencegah terjadinya tawuran warga

Camat makassar melihat tindakan yang dilakukan kepolisian ketika terjadi konflik yaitu memisahkan antara warga yang menonton dan pelaku tawuran sehingga pada saat dilakukan tindakan represif dapat diketahui pelaku tawuran dan menghindari jatuhnya korban, ketika tawuran usai pihak kepolisian memanggil orang tua dari para pelaku tawuran yang sudah diamankan. polisi juga membangun posko di wilayah yang terjadi tawuran warga.

Upaya yang dilakukan polisi dalam mengatasi konflik merupakan usaha untuk menghindari jatuhnya korban dalam tawuran warga, dan dalam mencegah tawuran warga mereka berusaha menjadi motivator dalam menciptakan keamanan lingkungan. Seperti yang dikemukakan camat tamalate bahwa Melalui kehadirannya di tengah-tengah warga maka oknum warga yang terlibat mengurungkan niatnya untuk melakukan tawuran susulan.

Tawuran warga akan terus berlanjut tanpa kehadiran polisi karena hanya polisi yang mampu melerai kedua belah pihak yang bertikai. kehadiran polisi mampu memfasilitasi upaya perdamaian kedua belah pihak. Tanpa kehadiran polisi maka aksi saling serang dan upaya perdamaian tersebut sulit untuk dilaksanakan mengingat kepolisian memiliki wewenang yang diatur oleh negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lurah balang baru juga melihat bahwa Tanpa kehadiran polisi saat tawuran berlangsung maka sulit untuk meredakan tindakan anarkis Pelaku Tawuran. kehadiran polisi dibutuhkan sebagai motivator dalam melakukan konsolidasi dengan tokoh masyarakat untuk membina hubungan yang harmonis antar warga.

Dengan kehadiran polisi saat terjadi tawuran maka ada upaya-upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Tanpa kepolisian, pemerintah dan masyarakat sulit untuk menentukan upaya hukum apa yang harus dilakukan dalam mengatasi konflik antarkelompok.

Sementara babinkamtibmas di kecamatan tamalate menjelaskan bahwa Dengan kehadiran polisi ketika tawuran maka dapat segera dilakukan tindakan yang profesional sesuai aturan hukum yang berlaku untuk mencegah terjadinya korban jiwa baik terhadap pelaku tawuran maupun kepada anggota polisi yang bertugas. Karena polisi berusaha mencari pemicu konflik dan melakukan pendekatan kepada Pemimpin Kelompok dari kedua belah pihak yang bertikai sehingga keinginan polisi terhadap keamanan warga bisa disampaikan oleh pemimpin kelompok kepada pengikutnya.

Ketua RT 05 Kelurahan Bara-Baraya Timur menyatakan bahwa Polisi Melakukan Tindakan tegas kepada pelaku tawuran seperti melakukan penangkapan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku tawuran sesuai dengan sanksi hukum yang berlaku.

Sedangkan Tokoh Agama di Kelurahan Bara-Baraya Timur menjelaskan bahwa Ketika terjadi tawuran warga polisi hanya membubarkan massa, jika polisi sudah pergi mereka tetap lanjut perang. Tindakan pencegahan yang dilakukan polisi biasanya dengan melakukan patroli bersama anggota FKPM di tempat-tempat berkumpulnya anak muda dimana konflik biasanya bermula.

Polisi dan tokoh masyarakat adalah mitra kerja yang tidak terpisahkan disisi lain polisi membutuhkan tokoh masyarakat sebagai partisipator dalam pelaksanaan tugasnya dan di sisi lain polisi juga di butuhkan oleh masyarakat sebagai lembaga atau badan yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peranan polisi sebagai pelindung pengayom dan pelayan

Camat Makassar selaku tokoh masyarakat formal menjelaskan Bentuk perlindungan yang dilakukan polisi dapat dirasakan apabila warga sudah merasa nyaman dalam melakukan aktivitasnya, menjadi pengayom berarti bisa menjadi panutan bagi warga dan ketika polisi melaksanakan perannya sebagai Pelindung dan pengayom maka perannya sebagai pelayan masyarakat dapat dirasakan. Lain halnya yang dikemukakan Camat Tamalate bahwa polisi di wilayahnya sudah cukup bagus karena mereka melindungi warga dengan mencegah terjadinya tawuran. Dan pengayoman yang diberikan dengan melakukan pendekatan di masyarakat dimana hal tersebut sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kemitraan kepada warga setempat, sebagai pelayan, polisi dituntut untuk melakukan respon yang cepat terhadap setiap pelaporan masyarakat. Hampir sama yang dikemukakan oleh Lurah Bara-baraya, ia menjelaskan bahwa Jika sifatnya lintas sektoral polisi merupakan pelindung wilayah sebab kehadiran polisi dalam suatu wilayah tentu menjadi “benteng” artinya wilayah tersebut akan terhindar gangguan dari luar yang berusaha mengacaukan situasi. terkait perannya sebagai pelayan polisi harus tanggap setiap pelaporan yang ada.

Lurah bara-baraya timur sendiri menjelaskan bahwa Sebagai pelindung polisi sebisa mungkin dapat membantu menyelesaikan persoalan sosial di masyarakat, Polisi sudah cukup mengayomi karena jika di lihat di lapangan sudah tidak ada lagi tawuran warga. Polisi berusaha mengubah mindset masyarakat terhadap pentingnya rasa aman di masyarakat melalui pembinaan yang dilakukan, dan sebagai pelayan sendiri polisi harus mampu memberikan rasa aman, karena di wilayahnya keamanan menjadi suatu kebutuhan.

Sementara beberapa tokoh masyarakat seperti Lurah Balang Baru dan Lurah Pa’baeng-Baeng melihat peranan kepolisian tersebut melalui kehadiran Babinkamtibmas (bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) di wilayahnya.

Lurah Pa’baeng-Baeng mengemukakan bahwa Polisi sudah melindungi masyarakat di wilayahnya hal tersebut bisa dilihat dari tindakan mereka yang telah bekerja sama dengan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang ada, sebagai pengayom mereka menghampiri warga untuk melakukan pendataan terkait keamanan masyarakat dan dilaporkan kepada pemerintah setempat. sebagai pelayan mereka selalu menghimbau masyarakat mengenai keamanan khususnya babinkamtibmas.

Hal tersebut sejalan dengan yang diutarakan oleh Babinkamtibmas Kecamatan Tamalate, ia menjelaskan bahwa mereka melibatkan masyarakat dalam mencari solusi untuk mengatasi konflik dan berbagai upaya preventif, karena itulah fungsi babinkamtibmas harus bisa menyatu dengan masyarakatnya.

Peranan polisi sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, sehingga informasi yang diterima oleh pihak kepolisian selaras dengan tindakan apa yang akan diambil nantinya.

Menerima masukan masyarakat, melakukan pendekatan-pendekatan yang menyentuh hati mereka khususnya mereka yang dianggap sebagai “panglima” di wilayah tersebut atau pemimpin kelompok .

Ketua RT 05 Kelurahan Bara-Baraya Timur menyatakan opininya bahwa dengan kehadiran polisi pada saat tawuran maka masyarakat sudah merasa terlindungi karena kalau tidak ada polisi tawuran tersebut tidak akan berhenti. mereka mengayomi masyarakat ketika memberikan arahan dan himbauan yang sifatnya menjaga

keselamatan warga, seperti pada saat terjadi tawuran, mereka menghimbau warga agar masuk rumah dan hanya mereka yang berjaga di luar. dengan adanya pos yang dibangun pasca konflik kami merasa polisi telah melayani masyarakat.

Lain halnya yang diutarakan oleh tokoh agama di wilayah kelurahan bara-baraya timur dimana peranan polisi sebagai pelindung dan pengayom dirasakan belum maksimal karena kehadirannya hanya pada saat terjadi tawuran, polisi hanya membubarkan massa baik itu penonton maupun pelaku tawuran, jarang ada yang di amankan. Namun perannya sebagai pelayan cukup maksimal karena saat kami panggil jika ada masalah, mereka dengan segera datang, ada umpan balik dari aparat.

Dengan melakukan tindakan tegas berupa menangkap pelaku tawuran dan membubarkan massa yang bentrok sangat berimplikasi terhadap peran polisi sebagai pelindung dan pengayom. Sedangkan peran sebagai pelayan melalui respon polisi ketika ada panggilan dari masyarakat.

Sementara tokoh agama di kelurahan Pa'baeng-Baeng sendiri menjelaskan bahwa Polisi di wilayahnya sudah melindungi masyarakat dengan menghalau warga yang sedang konflik, pengayoman polisi bisa kita lihat dari situasinya dimana bentrok tidak meluas. Pelayanannya bisa dirasakan dari kegiatan polisi yang rutin melaksanakan kontrol wilayah.

Tindakan menghalau warga yang dilakukan kepolisian merupakan suatu bentuk upaya untuk meredakan terjadinya konflik dan mencegah timbulnya korban, baik itu jiwa raga maupun harta benda. diperlukan sikap tanggap dari setiap personil kepolisian baik dalam melakukan pendekatan maupun mencari akar masalah dalam setiap konflik yang terjadi.

Lain halnya dengan yang di utarakan Orang yang di tuakan di Kelurahan Bara-Baraya Timur ia menyatakan bahwa Dengan adanya

pos pengamanan yang dibangun oleh pihak kepolisian kami merasa terlindungi. sebagai pengayom masyarakat polisi biasanya memberikan himbauan kepada anak-anak yang lagi kumpul-kumpul. Polisi telah melayani masyarakat. dan lebih bagus lagi apabila polisi melakukan tindakan tegas, sehingga ada efek jera bagi pelaku tawuran. Peranan polisi sebagai pelayan masih dirasakan cukup bagus namun belum ada tindakan keras dari aparat kepada pelaku tawuran.

Sedangkan orang yang dituakan di Kelurahan Bara-Baraya hampir sama dengan yang diutarakan Lurah Pa'baeng-Baeng dan Lurah Balang Baru dimana melihat peranan tersebut melalui kehadiran babinkamtibmas di wilayahnya.

Orang yang dituakan di Kelurahan Balang Baru menjelaskan bahwa Kehadiran polisi sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. polisi mengayomi dalam bentuk pembinaan melalui kegiatan futsal dan proaktif dalam kegiatan FKPM (forum komunikasi polisi masyarakat) bentuk pelayanan polisi saat ada tawuran maupun dalam mencegah tawuran bisa dilihat ketika ada kejadian mereka langsung turun tangan dan mendatangi Tokoh masyarakat.

PEMBAHASAN

Analisis Konflik

Kebanyakan konflik yang terjadi di kota makassar adalah masalah pribadi yang di bawa ke kelompok yang lebih besar. karena bagaimanapun kelompok dimana kita hidup bersama kita sedang melakukan interaksi dalam mengambil peranan komunikasi dan melakukan interpretasi yang sama-sama menyesuaikan tindakan, mengarahkan, dan kontrol diri serta perspektif, Garna (1996:76).

Manusia adalah makhluk sosial yang

membutuhkan orang lain terlebih kelompoknya karena manusia hidup mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama untuk mencapai suatu titik kebahagiaan, Usman (2001:33).

Bila kebutuhan akan rasa aman itu terancam maka mekanisme keteraturan yang dikembangkan masyarakat harus dipertahankan demi terwujudnya stabilitas atau keteraturan tersebut. Moore dalam Poloma (1994:148) mengatakan bahwa sebagai suatu mekanisme yang menjalankan fungsi masyarakat, bagaimanapun harus mendistribusikan anggota ke dalam berbagai posisi sosial dan mengajarkan mereka agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan posisi itu. Oleh karenanya banyak kejadian tawuran merupakan proses adaptasi masyarakat itu sendiri terhadap ancaman dari kelompok lain.

Adapun yang berpendapat bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh miras atau minuman yang mengandung kadar alkohol. minuman keras yang mengandung kadar alkohol tinggi dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. (wikipedia, 2015). Dan ketika perilaku yang ditimbulkan akibat minuman keras itu merugikan orang maka besar kemungkinan orang tersebut akan mengembangkan emosi. Homan dalam Ritzer (1992:94).

Lokasi penelitian memperlihatkan pula bahwa konflik yang terjadi dikarenakan persoalan warga dari luar namun salah satu pihak masuk ke wilayahnya sehingga warganya terkena imbas persoalan tersebut dan terjadilah tawuran warga sebagai bentuk pertahanan warga. Konflik bisa dilihat sebagai cara untuk mempertahankan stabilitas, Perycohen dalam Usman (2001:35). dalam mempertahankan stabilitas wilayahnya tentu warga yang merasa terancam akan melakukan perlawanan sebagai bentuk pertahanan mereka.

Ada juga yang melihat bahwa konflik yang terjadi dikarenakan tingkat pendidikan yang sangat rendah. Tingkat pendidikan yang rendah sangat berimbas pada pemahaman akan aturan, meningkatnya pengangguran, dan sulitnya mendapat pekerjaan. Pekerjaan diperlukan oleh setiap individu agar dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dan jika itu tidak terpenuhi maka sulit untuk menciptakan keteraturan dan rentan terjadinya konflik di masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan Usman (2001:35) masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mempunyai suatu mekanisme keteraturan yang dikembangkan bersama, keteraturan-keteraturan masyarakat tersebut akan bertahan apabila kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat seimbang antara satu dengan lainnya.

Adanya ragam suku dan profesi ditambah kepadatan penduduk menjadi hal yang rentan dalam melahirkan konflik. (wikipedia, 2015) Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

Dalam proses sosialisasi biasanya para individu di transformasikan berbagai penyimpangan (devian) melalui pilihan tentang apa yang baik dan apa yang buruk, termasuk bagaimana melakukannya, dan apabila kebiasaan yang telah dibentuk oleh kelompok lebih kuat maka sangat mungkin setiap individu turut berpartisipasi, baik itu terlibat dalam konflik.

Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna-makna yang dimiliki benda-benda itu bagi mereka, makna-makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial masyarakat, makna-makna dimodifikasikan dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya, Blumer

dalam Craib (1994:112). salah satu penyebab utama konflik adalah perilaku setiap pihak yang terlibat. sebagaimana yang dikatakan Weiten (2011:33) bahwa konflik sebagai keadaan ketika dua atau lebih motivasi atau dorongan berperilaku yang tidak sejalan harus diekspresikan secara bersamaan.

Setiap tokoh masyarakat berbeda dalam menganalisis persoalan konflik karena tiap wilayah beda permasalahannya. Banyak hal yang bisa menjadi celah terjadinya konflik, semua tidak lepas dari pemenuhan kebutuhan mendasar manusia, baik itu pekerjaan maupun dalam menjaga stabilitas relasi yang memungkinkan setiap individu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan dan kelompoknya.

Jika kebutuhan mendasar sulit di dapatkan maka konflik bisa masuk ke dalam setiap individu. Dan hal ini merupakan rentetan awal lahirnya perilaku-perilaku yang dapat merugikan orang lain dan perilaku ini bisa menjadi bentuk eksistensi setiap individu kepada kelompoknya.

Analisis Peranan Polisi

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Pengertian Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan. Berdasarkan hal tersebut peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, sehingga baik dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya merupakan implikasi terhadap peranan seseorang ataupun lembaga.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya

ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan melihat opini tokoh masyarakat terhadap peranan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan, maka dapat diketahui gambaran masyarakat tentang bagaimana bentuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang dipahami sekaligus menjadi referensi bagi kepolisian dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik.

Penilaian tokoh masyarakat terhadap peran polisi beragam mengenai peranannya sebagai pelindung antara lain dengan menghalau warga yang bertikai, melakukan penjagaan di lokasi tawuran, melakukan tindakan tegas saat tawuran berlangsung, Sedangkan dalam mencegah tawuran antara lain dengan melekatnya babinkamtibmas di tiap kelurahan, melibatkan tokoh masyarakat dalam mencari solusi terkait penyelesaian konflik, adanya pos pengamanan pasca konflik, serta dengan melakukan pembinaan-pembinaan kepada anak muda. Peranan polisi sebagai pelindung dapat dirasakan ketika kenyamanan warga dapat terjaga, tanpa ada ketakutan akan adanya ancaman tawuran. Membentengi masyarakat dari gangguan luar merupakan upaya polisi dalam mencegah adanya pihak-pihak yang melakukan perilaku provokatif yang dapat memicu terjadinya tawuran warga. hal tersebut bisa dilakukan dengan membangun pos pengamanan.

Adanya pos polisi akan memberikan akses layanan kepolisian yang lebih mudah kepada masyarakat, Lihawa (2005:57). Peranan polisi sebagai pelindung dapat dirasakan pula dengan kehadiran babinkamtibmas yang berbaur dengan masyarakat, melakukan pembinaan dan rutin melakukan kontrol wilayah.

Interaksi dengan masyarakat dapat meningkatkan sikap positif petugas kepolisian terhadap pekerjaan mereka dan terhadap masyarakat yang mereka layani

bahkan dapat mendorong mereka untuk mengembangkan solusi kreatif atas masalah masalah yang rumit sekalipun, Bodystun dalam Lihawa (2005:13).

Babinkamtibmas merupakan suatu perangkat di kepolisian yang secara khusus bertanggung jawab terhadap wilayah kelurahannya. Satu kelurahan biasanya terdapat satu orang babinkamtibmas.

Beberapa wilayah masih belum merasakan peranannya secara maksimal dikarenakan Tidak ada tindakan keras atau upaya – upaya represif di lapangan pada saat tawuran berlangsung yang bertujuan untuk memberi penyadaran terhadap perilaku dan memberi efek jera.

Tugas represif sendiri merupakan Tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Upaya represif kepolisian antara lain melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan. Atmaja (2014:17)

Sebagai pengayom saat terjadi tawuran antara lain dengan memberikan himbauan kepada warga yang sifatnya untuk melindungi keselamatan warga, sedangkan dalam mencegah tawuran antara lain dengan memberikan pembinaan kepada warga baik orang tua maupun anak-anak muda, keterlibatan polisi dalam kegiatan informal masyarakat, juga keaktifan polisi dalam wadah FKPM (forum komunikasi polisi masyarakat).

Peranan polisi sebagai pengayom sangat berimplikasi terhadap perannya sebagai pelindung sebab apabila polisi melaksanakan perannya sebagai pelindung maka perannya sebagai pengayom juga dirasakan oleh masyarakat.

Pada dasarnya peranan polisi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan, juga sangat bergantung dengan situasi massa pada saat itu.

Memberikan motivasi melalui kegiatan informal seperti pertandingan olahraga sehingga dapat menanamkan nilai-nilai di masyarakat utamanya rasa saling menghormati antar sesama.

keterlibatan polisi dalam kegiatan informal masyarakat juga mengisyaratkan peran polisi sebagai pengayom. di semua lokasi penelitian dibentuk suatu wadah dalam membangun kemitraan sekaligus sebagai tempat antara polisi dan masyarakat berbagi informasi, atau disebut FKPM (forum komunikasi polisi masyarakat) yang merupakan strategi kepolisian untuk melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. para anggota FKPM biasanya diambil dari tokoh masyarakat setempat.

Pertemuan warga dengan polisi secara teratur dengan adanya forum polisi masyarakat setempat dapat memberikan kesempatan baik kepada polisi maupun anggota masyarakat untuk membahas masalah yang ada dan jalan keluarnya, Lihawa (2005:20).

Sebagai pelayan sendiri dapat dirasakan pada saat terjadi tawuran antara lain seperti Respon Polisi setelah ada laporan dari masyarakat, tindakan tegas kepada pelaku tawuran. Sedangkan dalam mencegah tawuran antara lain dengan kehadiran Babinkamtibmas yang berbaur dalam setiap kegiatan masyarakat, adanya pos yang dibangun pasca konflik, rutin dalam melaksanakan kontrol wilayah, juga dengan mendatangi para tokoh masyarakat dalam rangka mencari solusi penyelesaian konflik.

Peranan polisi sebagai pelayan sendiri juga sangat berimplikasi terhadap perannya sebagai pelindung dan pengayom. Pelayanan kepolisian tidak lepas dari respon polisi ketika ada laporan dari masyarakat mengenai tawuran. masyarakat khawatir akan jatuhnya korban akibat tawuran warga, baik itu jiwa maupun harta benda, oleh karenanya Kehadiran polisi saat di TKP (Tempat Kejadian Perkara) sudah menjadi

kebutuhan warga di daerah rawan konflik. Sekalipun reaksi cepat polisi dapat memperbesar kemungkinan untuk menangkap basah pelaku, waktu pelaporan oleh warga setelah kejadianlah yang menentukan saat dimulainya waktu polisi untuk melakukan respon cepat, Lihawa (2005:12).

Dalam menghentikan atau meredakan konflik upaya yang dilakukan polisi tersebut masih berupa himbauan baik kepada pihak yang terlibat tawuran maupun kepada para penonton yang berada disekitar lokasi tawuran, untuk menghindari jatuhnya korban jiwa.

Namun ketika upaya polisi dalam meleraikan dan menghalau para pihak yang terlibat tawuran tidak diindahkan, maka polisi mengambil tindakan tegas seperti melakukan tembakan peringatan bahkan menembakkan gas air mata kearah pelaku tawuran untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan aksi anarkis yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga, namun tetap sesuai dengan standar operasional kepolisian.

Sedikit berbeda yang dilakukan polisi di kecamatan Tamale dimana mereka mencari warga yang di dengar suaranya dari pihak yang terlibat dan meminta untuk berbicara kepada massanya agar tidak melakukan perilaku anarkis. Sambil tetap melakukan langkah-langkah yang proporsional untuk menghindari jatuhnya korban jiwa.

Dalam mencegah tawuran kepolisian melakukan pendekatan dengan sasaran para tokoh masyarakat, pemimpin kelompok dari pihak yang terlibat tawuran, para orang tua dan pemerintah setempat. membuat pos pengamanan, sehingga tidak ada kesempatan dari para pelaku tawuran untuk melakukan aksinya. Dan upaya selanjutnya adalah dengan melakukan patroli.

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga

diketahui rutinitas masyarakat di satu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang di luar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Topo (2003:9)

Sangat penting bagi kepolisian bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mengidentifikasi keprihatinan mereka dan untuk mencari jalan keluar yang paling efektif dimana masyarakat tidak lagi takut dalam melaksanakan aktivitasnya.

Analisis Opini Tokoh Masyarakat

Tawuran warga sebagai suatu fenomena sosial di masyarakat dimana opini publik itu sendiri pada dasarnya harus menyangkut kepentingan umum, peranan kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat khususnya di wilayah rawan konflik kota makassar menjadi suatu kebutuhan, karena pada dasarnya peranan kepolisian tersebut akan memberikan efek berupa rasa aman kepada warga.

Beragam opini yang dilontarkan tokoh masyarakat daerah rawan konflik dengan melihat upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dan dampaknya bagi keamanan wilayah mereka. Beberapa yang melihat korelasi antara tugas polisi dan pemerintah setempat dimana Polisi “mengambil” sebagian tugas pemerintah dalam hal ketertiban. ini berarti bahwa polisi dan pemerintah saling membantu dan berbagi tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Komunikasi dalam lingkup wilayah jabatan antara Tokoh Masyarakat Formal dan kepolisian berlangsung sangat baik, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dapat saling dipahami. Perilaku komunikatif seseorang sebagian besar terbentuk oleh pandangan dan persepsi orang tersebut saat berhubungan dengan orang lain, Laing dalam Usman (2001:33).

Dalam menjalankan fungsi perwakilan dan integrasi seorang tokoh masyarakat membutuhkan peranan kepolisian dalam mengelola konflik yang terjadi di masyarakat. sehingga mampu mempengaruhi sikap orang lain secara informal dalam suatu sistem sosial. Hubungan yang akrab dengan masyarakat tidak boleh dibatasi hanya pada suatu insiden terpisah pada suatu rangkaian insiden ataupun pada suatu jangka waktu tertentu saja. Kemitraan antara polisi dan masyarakat haruslah merupakan suatu kemitraan yang berlangsung lama dan seimbang.

Polisi mendukung, memotivasi para tokoh-tokoh yang ada di masyarakat dan melibatkan diri dalam memelihara nilai-nilai serta norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam teori pemuka pendapat seorang opinion leader harus bisa menjadi komunikator yang handal dan dapat dipercaya khalayaknya. Burgoon, Heston dan Mc. Croskey dalam Sendjaja (2004:104). Tindakan polisi yang telah mempertemukan kedua pimpinan kelompok tawuran, merupakan hal yang sulit untuk dilakukan, karena sering yang dipertemukan hanyalah tokoh masyarakat bukan pihak yang bertikai.

Dibutuhkan komunikasi yang intens kepada warga, sehingga mampu mempengaruhi sikap seseorang. dari upaya tersebut dapat diketahui bahwa Polisi melakukan fungsi inisiasi dimana seorang tokoh harus dapat mengambil inisiatif untuk gagasan atau ide baru. Mempertemukan secara langsung pihak yang bertikai masih sangat jarang dan sulit dilakukan di daerah rawan konflik.

Polisi Juga melakukan fungsi integrasi dimana kemampuan seorang tokoh karena jabatannya dalam mengelola dengan baik konflik yang ada dan muncul di kelompoknya. seperti memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang dilakukan bersama dengan tokoh agama.

Menjadi bagian dari masyarakat, melakukan pembauran, kesamarataan dalam memelihara keamanan mengisyaratkan keanggotaan polisi di masyarakat.

Polisi sangat dominan dalam melakukan tindakan pencegahan. Polisi berusaha menjaga komunikasi yang berkesinambungan dan intens kepada warga. Proses komunikasi terjadinya teori Stimulus-Respon tidaklah terjadi sekali saja. Stimulus-Respon terus berulang-ulang menimpa manusia untuk mempengaruhi pendapat manusia. Karenanya satu pesan dibangun dari pesan sebelumnya, karenanya ada saling ketergantungan antara masing-masing komponen komunikasi, West dan Turner (2008:15).

Dalam setiap kesempatan polisi harus mampu mengembangkan hubungan yang positif dan melihat Masyarakat bukan lagi sebagai suatu kehadiran pasif atau sebagai sumber informasi terbatas tetapi sebagai mitra dalam melakukan usaha-usaha untuk mengatasi dan mencegah terjadinya konflik. Kehadiran polisi dalam mengatasi maupun mencegah terjadinya konflik antar kelompok diwujudkan dalam bentuk perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. dengan kehadiran polisi saat bentrokan maka para pelaku tawuran mengurungkan niatnya melakukan tindakan-tindakan anarkis yang dapat merugikan orang lain karena polisi bertugas memelihara keamanan masyarakat yang diatur dalam undang-undang, sehingga tindakannya haruslah berlandaskan hukum. Sedangkan kehadiran polisi saat mencegah terjadinya tawuran sangat penting agar tidak terjadi bentrokan susulan, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kamtibmas, ada upaya hukum serta sanksi yang mengikat kepada pelaku tawuran guna memberikan efek jera.

Tindakan pengamanan yang dilakukan kepolisian juga tidak lepas dari keluhan warganya, masyarakat sering menyudutkan

peranan kepolisian karena dalam tubuh kepolisian sendiri masih ada oknum yang merusak citra Lembaga sehingga banyak keluhan masyarakat dialamatkan ke institusi kepolisian. James Lull dalam Ollie (2007:108-113) mengatakan bahwa citra suatu lembaga dapat diketahui melalui opini khalayaknya. Perbuatan-perbuatan yang merusak citra kepolisian tersebut antara adanya personil yang kurang bersahabat, menjadi beking tempat maksiat, dan "bermain" ketika ada kasus. terlepas dari itu tindakan pengamanan yang dilakukan kepolisian dalam meredakan konflik pun mendapatkan keluhan dari masyarakat karena ada kesan bahwa polisi hadir di masyarakat hanya pada saat ada kejadian, figur polisi yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat masih terasa belum maksimal.

Dukungan terhadap peranan kepolisian sangat diperlukan dari para pendidik baik orang tua, guru, maupun para tokoh masyarakat dalam melakukan pembinaan di lingkungannya. Adapun anggapan bahwa polisi tidak dapat melakukan tindakan tegas saat terjadi tawuran yang seolah-olah hanya pembiaran.

Melindungi masyarakat pada saat terjadi tawuran bukanlah perkara mudah karena selain menyelamatkan orang lain, keselamatan diri pada saat bekerja pun harus diperhatikan, Warga yang terlibat biasa mempersenjatai diri dengan senjata tajam bahkan menggunakan senapan sehingga aparat yang bertugas sangat berhati-hati dalam mengambil tindakan.

Internal kepolisian sendiri telah mengatur Prosedur tetap setiap personil ketika berhadapan dengan tindakan anarkis yang diatur dalam protap 01 tahun 2010. Dengan memperhatikan eskalasi massa sehingga tindakan yang diambil tetap proporsional dimana setiap anggota Polri yang melakukan

tugas harus senantiasa menjaga keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.

Adapula kesan di masyarakat bahwa kepolisian dalam pelaksanaan tugas seakan-akan mendukung warganya dan mengelompokkan personil polisi sesuai dengan wilayah dia bertugas. Beberapa masyarakat masih belum paham akan tugas pokok kepolisian yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun satuan yang paling bawah (Polsek) karena dalam bertindak, polisi tetap melakukan koordinasi yang berkesinambungan antara pihak polres (kepolisian tingkat kabupaten atau kota) dan polsek (kepolisian tingkat kecamatan).

Upaya yang dilakukan polisi dan tokoh masyarakat kadang tidak di dukung oleh warga sendiri, beberapa masyarakat masih enggan dalam memberikan informasi kepada anggota polisi, padahal informasi dibutuhkan untuk mengambil langkah guna menemukan jalan keluar setiap permasalahan sosial.

Ketidakhahaman masyarakat mengenai cara kerja kepolisian dan aturan-aturan yang berlaku dalam internal kepolisian, membuat pemikiran masyarakat jadi berkembang yang dapat mengarah pada munculnya opini publik negatif. karena Opini publik cenderung sesuai dengan kemauan banyak orang, olii (2011:52).

Berbagai Opini Tokoh Masyarakat sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut, dan berita yang berkembang. kesemuanya itu akan membentuk persepsi seseorang dalam menanggapi sebuah peristiwa yang berlangsung, rosady (1998:92).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan:

1. Tokoh Masyarakat melihat peranan Polisi sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan diwujudkan dalam kehadirannya saat mengatasi maupun mencegah terjadinya konflik, Namun masih belum maksimal dalam melakukan tindakan Represif saat terjadi tawuran, disisi lain upaya pencegahan sangat dominan dilakukan melalui Kegiatan FKPM dan kehadiran Babinkamtibmas.
2. Bentuk perlindungan yang dirasakan masyarakat adalah dengan tindakannya menghalau warga yang bertikai dan melakukan penjagaan di lokasi tawuran. Bentuk pengayoman diaplikasikan dengan memberikan pembinaan kepada warga baik orang tua maupun anak muda di wilayah rawan konflik. Bentuk pelayanan dapat dirasakan dengan respon yang cepat dari polisi setelah ada laporan dari masyarakat.
3. Opini Tokoh Masyarakat bisa menjadi referensi utama dalam pemenuhan fasilitas yang menunjang tugas kepolisian saat terjadi tawuran dan merupakan informasi awal dalam menemukan akar masalah tawuran warga yang tentunya berimplikasi terhadap tindakan kepolisian yang proporsional dan akuntabel.

DAFTAR RUJUKAN

Arifin, Anwar. 2008. *Opini Publik*, Pustaka Indonesia : Jakarta.

Atmaja, Danu R. 2014. *Kebijakan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Tulang Bawang*.

Tesis Prodi Ilmu Hukum Unila : Bandar Lampung.

Cangara, Hafied. 2014. *Komunikasi politik: teori, konsep dan strategi*. Edisi revisi. Rajawali Pers : Jakarta.

Craib, Ian. 1994. *Teori-teori Sosial Modern*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Fahmi, Chairul. 2014. *Jejak konflik baru di aceh*. Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh : Aceh.

Garna, K. Judistira. 1996. *Ilmu-ilmu sosial dasar konsep-posisi*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran : Bandung.

Hall, C.S. dan Lindzey G. 1985. *Introduction to theories of personality*. Kanisius : Jakarta.

Hasnida. 2002. *Kesesakan dan kepadatan*. Digital Library Prodi Psikologi USU: Medan.

Lihawa, Ronny. 2005. *Memahami Perpolisian Masyarakat*. Cetakan Kedua. Biro Bimmas SDEOP Polri : Jakarta.

Manolang, Erich. 2013. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Naha Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe)*. E-journal Unsrat : Manado.

Ola Pool, Itheil de, (editor). 1973. *Hand Book of Public Relations*. Rand M. Nally Publishing Company : USA.

Olii, Helena, Novi Erlita. 2011. *Opini Publik*. PT. Indeks. Jakarta.

Olii, Helena. 2007. *Opini Publik*. PT Indeks: Jakarta.

Poloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Prosedur Tetap Polri Nomor 1 tahun 2010. *Penanggulangan Anarki*. 8 Oktober 2010: Jakarta.

Ritzer, George. 1992. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajawali Pers : Jakarta.

Rosady, Ruslan. 1998. *Manajemen Public*

- Relations dan Media Komunikasi*, Rajawali pers : Jakarta.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2004. *Teori Komunikasi*, Universitas Terbuka: Jakarta.
- Soemirat. 2003. *Dasar-dasar Public Relations*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Soekanto Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Suhendi, Ahmad. 2013. *Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI : Jakarta timur.
- Tambunan, R.O. 1994. *Opini Publik : Suatu Pengantar Ilmiah*. PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Topo, Santoso. 2003. *kriminologi*. Rajawali Pers : Jakarta.
- Usman, Ridwan. 2001. *Konflik Dalam Perspektif Komunikasi : Suatu Tinjauan Teoritis*. Mediator. Fakultas Ilmu Komunikasi Unisba : Bandung.
- Weiten, W. 2011. *Psychology Themes and Variation*. Wadsworth : Las Vegas.
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi edisi 3*. Salemba Humanika : Jakarta
- Wicaksono, R. 2011. *Peranan Polri dalam Penyelesaian Konflik Sosial Studi Kasus Pembongkaran Makam Mbah Priok*. Tesis. Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Kekhususan Manajemen Sekuriti Universitas Indonesia : Jakarta.
- Wulansari, Mukti. 2014. *Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mengatasi Tawuran warga*. Jurnal PPKN UNJ Online: Jakarta. PT. Grasindo: Jakarta.